



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERNA IDAWATI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 687493

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 336 m2/562 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 366 m2/510 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/147 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 41.29 m2/100 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 46.38 m2/100 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 106.95 m2/100 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 35.000.000

1. MOBIL, SUZUKI PICK UP Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 31.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.025.429

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 4.868.025.429

III. HUTANG

Rp. 386.300.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.481.725.429



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.